LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

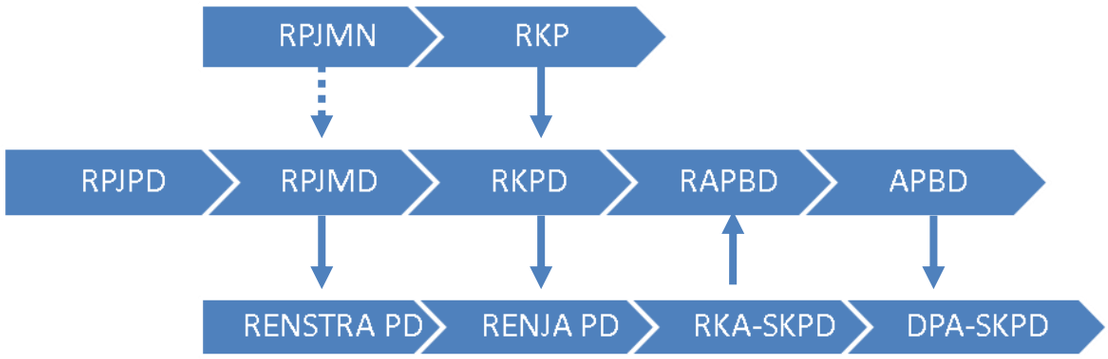
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menjabarkan rencana Program/kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
f) pengelolaan dan pengembangan e-government dan smartcity;
g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Statistik Dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari :
   a. Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
   b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
   c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

3. Bidang Aplikasi Informatika dan persandian, terdiri dari :
    a. Seksi Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan informasi;
    b. Seksi Aplikasi dan database;
    c. Seksi Tata Kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .....Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (ke-satu) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui capain kinerja program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra ; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan III Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2018 s/d tahun 2023 (Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d. RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja (2022)	Realisasi Renja (2022)	Tingkat Realisasi Th 2022 (%)		Reaslisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**Urusan : Wajib Bukan Pelayanan dasar**									
2.16	**Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika**									
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**Prosentase Kegiatan Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang di laksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**78**	**78**	**100%**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang di susun**	**40 Dokumen**	**19 Dokumen**	**15 Dokumen**	**9 Dokumen**	**40%**	**12 Dokumen**	**40 Dokumen**	**100%**
2.16.01.2.01.16	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	40 Laporan	19 Lap	8 Laporan	6 lap	75%	5 Dokumen	30 Dokumen	75%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi perangkat Daerah yang di susun**			**19 Dokumen**	**8 Dokumen**	**42%**	**70 Dokumen**		**0%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	20 ASN	20 Asn	26 ASN	22 Asn	120%	26 ASN	26 ASN	130%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Lap	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 lap	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang di susun**			**1 dokumen**	**3 dokumen**	**100%**	**25 dokumen**	**25 dokumen**	**100%**
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	240 keg	74 Keg	48 kegiatan	29 Kali	60%	48 Kegiatan	48 Kegiatan	20%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi bagian umum yang dilaksanakan**			**15 Fasilitasi**	**9 Fasilitasi**	**60%**	**15 Fasilitasi**	**15 Fasilitasi**	**100%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 Jenis	14 jenis	7 Jenis	8 Jenis	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	50%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	19 jenis	19 jenis	40 Bahan	40 Bahan	100%	40 Bahan	40 Bahan	211%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	30.000bh cetakan, 75.000lbr penggandaan	77.740 Copy	25.000 Lembar	11874 Lb penggandaan	47%	4,00621lembar	4,00621lembar	82%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	3840 eksemplar	2430 Eksemplar	1440 eksemplar	950 eksemplar	66%	700 eksemplar	700 eksemplar	29%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	650 Keg	91keg	40 Kali	28 Kali	70%	40 Kali	40 Kali	6%
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	1200 arsip	775 Arsip	300 Arsip	300 arsip	85%	300 arsip	300 arsip	25%

2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah barang milik daerah yang di adakan**			**71 unit**	**11 unit**	**15%**	**14 buah**	**14 buah**	**100%**
2.16.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	72 Unit	61buah	10 Buah	-	-	12 buah	12 buah	17%
2.16.012.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	96 Unit	50 unit	14 Buah	14 Buah	100%	10 unit	10 unit	10%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8 Jasa**	**5 Jasa**	**100%**	**5 Jasa**	**5 Jasa**	**6241%**
2.16.012.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	1000 materai	470 materai	145 materai	60 materai	41%	145 materai	145 materai	15%
2.16.012.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di bayarkan	2 jasa	2 jasa	2 Jasa	2 Jasa	100%	2 jasa	2 jasa	100%
2.16.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	2 jasa	2 jasa	2 Jasa	2 Jasa	100%	1Jasa	1Jasa	50%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara**			**55 unit**	**14 unit**	**25%**	**50 unit**	**50 unit**	**5183%**
2.16.012.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan.	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	8 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	125%
2.16.012.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin yg di pelihara	100 unit	25 unit	24 Unit	16 Unit	67%	5 Unit	5 Unit	5%
2.16.012.09.09	Pemeliharan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100%	2 gedung	2 gedung	100%
2.16.02	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Presentase jenis layanan informasi publik yang tersedia**	**7 Media**	**9 Media**	**80%**	**50%**	**63%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah**	**Jumlah jenis layanan informasi publik yang tersedia**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**2 jenis**	**50%**	**7 Media**	**7 Media**	
2.16.02.2.0105	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Forum Komunikasi Publik	112 kali	11kali	5 kali			12 kali	12 kali	50%
		Jumlah hari siar Radio Rsal yang terlaksanan dengan baik	1825 hari	910 hari	365 Hari	270 Hari	75%	1365 hari	1365 hari	
		Jumlah Publikasi lewat bener	20	20	1250 m2	700 m3	56%	1,250 m2	1,250 m2	
		Jumlah publikasi lewat SMS/WA	200,000	496.000 SMS	60000 sms	-	-	60,000	60,000	
		Jumlah Update website per minggu	4 kali seminggu	7 kali seminggu	7 kali seminggu	17 Kali	242%	7 kali seminggu	7 kali seminggu	
2.16.02.2.0106	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mengisi konten PPID	50 OPD	50 OPD	50 OPD	50 OPD	100%	52 Opd	52 Opd	100%
		Jumlah OPD yang terfasilitasi menangani pengaduan.	50 OPD	50 OPD	50 OPD	50 OPD	100%	52 Opd	52 Opd	
2.16.02.2.0108	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok informasi masyarakat yang dibina	165 Kim	36 Kim	15 KIM	10 Kim	75%	15 Kim	15 Kim	100%

2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh**	**50 PD**	**50 PD**	**50 PD**	**50 PD**	**100%**	**33 SI**	**33 SI**	**66%**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah**	**Jumlah Sub Domain yang tersedia dan di kelola**	78 subdomain	80 subdomain	**52 Sub Domain**	78 sub domain	**100%**	79 sub domain	79 sub domain	**101%**
2.16.03.2.0101	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	Jumlah lisensi domaian	1Domain	1Domain	1Domain	-	-	1domian	1domian	100%
2.16.03.2.0103	penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia	1100 mb	1100 mb	1100 mb	1394 mbps	100%	1300 mb	1300 mb	118%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah**	**Jumlah aplikasi pengelolaan E-governmant yang tersedia**	**33 aplikasi**	**33 aplikasi**	**33 aplikasi**	**33 aplikasi**	**100%**	**36 aplikasi**	**36 aplikasi**	**109%**
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur pendukung pengelolaan pusat data	25 unit	24 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	446%
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	30 Aplikasi	33 Aplikasi	3 Kegiatan	2 kegiatan	67%	4 kegiatan	4 kegiatan	13%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik.	Jumlah kegiatan pengembangan aplikasi informatika	3 aplikasi	1Aplikasi	3 Kegiatan	3 Aplikasi	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	133%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah.	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	5 aplikasi	1aplikasi				5 apliksi	5 apliksi	100%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan	Jumlah infrastruktur pendukung Smart City yang tersedia	1Unit CC	1unit cc	1Unit	1CC	100%	4 unit	4 unit	400%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.	Jumlah tenaga TIK yang dikembangkan kapasitasnya	10 org	10 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	200%
2.20	**Bidang Urusan : Statistik**						-			
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik sektoral**	**Presentase data sektoral yang tersedia dan update**	**3 buku**	**4 buku**	**80%**	-	-	**4 buku**	**4 buku**	**133%**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data sektoral yang tersedia dan update**	**298 data set**	**298 data set**	**298 data set**	-	-	-	-	**100%**
2.20.02.2.0101	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik sektoral.	Jumlah Database statistik daerah yang tersusun	4 database	1Database	1Database	-	0%	298 Datasheet	298 Datasheet	80%

2.20	**Bidang Urusan : Statistik**						-			
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik sektoral**	**Presentase data sektoral yang tersedia dan update**	**3 buku**	**4 buku**	**80%**	-	-	**4 buku**	**4 buku**	**133%**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data sektoral yang tersedia dan update**	**298 data set**	**298 data set**	**298 data set**	-	-	-	-	**100%**
2.20.02.2.0101	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik sektoral.	Jumlah Database statistik daerah yang tersusun	4 database	1Database	1Database	-	0%	298 Datasheet	298 Datasheet	80%
2.21	**Bidang Urusan : Persandian**									
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan**	**Prosentase Sarpras Penyelenggaraan persandian**	**100%**	**80%**	**80%**	**80%**	**100%**	**40%**	**40%**	**80%**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah sarana dan prasarana keamanan informasi yang tersedia**	**10 unit**	**10 unit**	**10 unit**	**-**	**-**	**1 buah**	**1 buah**	**80%**
2.2102.2.0101	Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah an daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah sarana dan prasarana keamanan informasi	50 Opd	50 Opd	1Buah	-	-	1buah	1buah	100%
							66,02%			
						dikat kinerja	**Sedang**			

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan III Tahun 2022 hasil yang dicapai sebesar 66,02% dengan kreteria Sedang. Dari Program/kegiatan dan subkegiatan Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Dinas Kominfo berupaya memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika secara baik	Target Renstra PD tercapai	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Informasi dan Komunikasi Publik	63 %	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Keberadaan media komunikasi di Kabupaten Nganjuk yang belum lengkap	Target Renstra PD belum tercapai	Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi melalui media yang populer di Kabupaten Nganjuk
Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	100%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Meningkatnya kebutuhan akan digitalisasi di semua bidang pelayanan Pemerintah.	Target Renstra PD sudah tercapai	Meningkatkan kuantitas dan kualitas aplikasi serta infrastruktur pendukungnya.
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Masih di laksanakan bimtek kepada Perangkat daerah agar memahami penyelenggaraan statistik sektoral.	Target Renstra PD tidak tercapai	Melaksanakan pengumpulan data melalui data base satu data
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tata laksana pengamanan informasi telah dilaksanakan sehingga tahun ini tidak terjadi hack pada aplikasi yang ada.	Target Renstra PD tercapai	Meningkatkan sarana prasarana keamanan informasi.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi		Catatan analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*16*	*17*	*18*
1	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	cukup (1,8 – < 2,6)	cukup (1,8 – < 2,6)	baik (2,6 – < 3,5)	baik (2,6 – < 3,5)	sangat baik (3,5 – < 4,2)	cukup (2,22)	baik (2,62)	cukup (2,14)	baik (2,6 – < 3,5)	sangat baik (3,5 – < 4,2)	-
2	Persentase Aplikasi e-Government yang terhubung dengan jaringan	-	-	-	90%	90%	90%	-	-	92%	92%	94,5%	-	-	-
3	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	-	-	-	80%	85%	90%	-	-	100%	100%	71%	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, indikator nilai indeks SPBE dan indikator Presentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik belum tercapai. Penyebab tidak tercapainya target nilai indeks SPBE dikarenakan indikator penilaian tahun 2021 semakin banyak dan kompleks sehingga yang belum bisa dicukupi. Sedangkan indikator Presentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik belum tercapai disebabkan oleh banyaknya Admin PPID dan Lapor SP4N yang pensiun/pindah selain itu indikator keterbukaan informasi publik tidak digunakan sebagai indikator kinerja organisasi untuk pembayaran TPP sehingga kegiatan ini tidak diprioritaskan oleh OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana tabel 2.3.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, didukung data yang valid dan terbarui. Data dukung: a. Capaian Indeks SPBE - **2021 2,14** - **2020 2,62** - **2019 2,22**	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK Data dukung: - Persentase OPD terlayani jaringan fiber optik internet dedicated pada **2021: 36%**	1. Penyediaan jaringan internet masih tersebar pada perangkat daerah atau belum terintegrasi sepenuhnya pada Diskominfo Data dukung: - Anggaran internet pada 52 OPD R-APBD **2023: Rp. 5,3 Milyar**

b. Capaian Indeks KAMI **2021 83**	2. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK Data dukung: - Jumlah ASN Nganjuk kualifikasi TIK **2022 : 72 orang** 3. Dukungan kebijakan belum optimal - Perda SPBE: **belum tersedia** - Perda Keterbukaan Informasi Publik: **belum tersedia**	2. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN Data dukung: - Anggaran diklat TIK APBD **2022: belum tersedia** 3. Belum optimalnya pengelolaan data daerah Data dukung: - Tingkat kematangan kebijakan manajemen data 2021: **2 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan penerapan manajemen data 2021: **1 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan layanan data terbuka 2021**: 1 (dari optimal 5)** 4. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal Data dukung: - Predikat Keterbukaan Informasi Publik Kab. Nganjuk **2021: Kurang Informatif** 5. Penerapan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya optimal Data dukung: - Skor RB **2021: 78**

Identifikasi Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tingginya kebutuhan implementasi transformasi digital.
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi.
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang valid dan terbarui.
4. Menguatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap keamanan informasi.

A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pesatnya perkembangan TIK;
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;

5. Terbatasnya kualitas SDM dan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK.
6. Pandemi covid 19 yang menyebabkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan menurunnya perekonomian.

Peluang :

1. Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika;
2. Kepedulian dan dukungan pimpinan terhadap bidang komonikasi dan informatika;
3. Dukungan pemerintah dan KPK untuk mendorong implementasi e-government untuk mewujudkan good governance;
4. Adanya perjanjian kerja sama antar daerah untuk implementasi dan pengembangan e-government;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dan informasi;
6. Adanya bantuan dari Kemenkominfo untuk menyusun roadmap smartcity Kabupaten Nganjuk.

B. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Optimalisasi Pelaksanaan e-Govermant di Kabupaten Nganjuk;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya;
4. Pengelolaan website Pemkab Nganjuk;
5. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;
6. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
7. Melaksanakan layanan pengaduan publik melalui Wadul Bupati dan Lapor SP4N;
8. Penyusunan Data Statistik yang lebih akurat dan tepat waktu;
9. Pengamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Proses review rancangan awal Renja Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal Renja Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja , atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel. 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**Diskominfo**	**80**	**6,420,592,550**		**80**	**6,420,592,550**	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**82**			**82**		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Diskominfo**	**69 Dok**	**30,000,000**		**69 Dok**	**30,000,000**	
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	3 Dok	6,000,000	Diskominfo	3 Dok	6,000,000	
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	10,000,000	Diskominfo	30 Dok	10,000,000	
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	10,000,000	Diskominfo	30 Dok	10,000,000	
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	6 Laporan	4,000,000	Diskominfo	6 Laporan	4,000,000	
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**Diskominfo**	**63 Dok**	**3,523,000,000**		**63 Dok**	**3,523,000,000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	22 ASN	3,500,000,000	Diskominfo	22 ASN	3,500,000,000	
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	45 Dok	15,000,000	Diskominfo	45 Dok	15,000,000	
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	1 Lap	5,000,000	Diskominfo	1 Lap	5,000,000	
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	13 Lap	3,000,000	Diskominfo	13 Lap	3,000,000	

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Diskominfo**	**25 Dok**	**515,000,000**		**25 Dok**	**515,000,000**	
a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskominfo	20 Orang	8,000,000	Diskominfo	20 Orang	8,000,000	
b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	24 paket	7,000,000	Diskominfo	24 paket	7,000,000	
c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	100 Orang	500,000,000	Diskominfo	100 Orang	500,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**Diskominfo**	**12 laporan**	**428,092,550**		**12 laporan**	**428,092,550**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	6,000,000	Diskominfo	1 Paket	6,000,000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	50,000,000	Diskominfo	1 Paket	50,000,000	
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	2,000,000	Diskominfo	1 Paket	2,000,000	
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	4 Paket	90,000,000	Diskominfo	4 Paket	90,000,000	
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	2 paket	16,000,000	Diskominfo	2 paket	16,000,000	
f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	1000 dok	7,000,000	Diskominfo	1000 dok	7,000,000	
g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	30 Lap	250,000,000	Diskominfo	30 Lap	250,000,000	
h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskominfo	300 dok	7,092,550	Diskominfo	300 dok	7,092,550	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Diskominfo**	**26 buah**	**1,150,000,000**		**26 buah**	**1,150,000,000**	
a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Diskominfo	2 unit	1,000,000,000	Diskominfo	2 unit	1,000,000,000	
b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	15 unit	150,000,000	Diskominfo	15 unit	150,000,000	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Diskominfo**	**4 jasa**	**476,500,000**		**4 jasa**	**476,500,000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	4 Laporan	1,500,000	Diskominfo	4 Laporan	1,500,000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	400,000,000	Diskominfo	12 Laporan	400,000,000	
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 laporan	75,000,000	Diskominfo	12 laporan	75,000,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Diskominfo**	**42 unit**	**298,000,000**		**42 unit**	**298,000,000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	10 unit	175,000,000	Diskominfo	10 unit	175,000,000	
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Diskominfo	5 unit	10,000,000	Diskominfo	5 unit	10,000,000	
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Diskominfo	25 unit	13,000,000	Diskominfo	25 unit	13,000,000	
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	2 Unit	100,000,000	Diskominfo	2 Unit	100,000,000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**Diskominfo**	**100%**	**5,275,597,589**		**100%**	**5,275,597,589**	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	**Diskominfo**	**80%**			**80%**		
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	**Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar**	**Diskominfo**	**52 PD**	**1,510,597,589**		**52 PD**	**1,510,597,589**	
	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	**Diskominfo**	**8 Layanan**			**8 Layanan**		
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo	1 Pusat Data	700,000,000	Diskominfo	1 Pusat Data	700,000,000	
b) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	4 Aplikasi	350,000,000	Diskominfo	4 Aplikasi	350,000,000	
c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Dok	360,597,589	Diskominfo	1 Dok	360,597,589	
d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo	1 Dok	100,000,000	Diskominfo	1 Dok	100,000,000	

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	**Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**Diskominfo**	**52 PD**	**3,765,000,000**		**52 PD**	**3,765,000,000**	
a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	12 Dokumen	15,000,000	Diskominfo	12 Dokumen	15,000,000	
b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Sistem	3,750,000,000	Diskominfo	1 Sistem	3,750,000,000	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**Diskominfo**	**65%**	**100,000,000**		**65%**	**100,000,000**	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan kegiatan self Asesment website dan aplikasi**	**Diskominfo**	**2 Lap**	**100,000,000**		**2 Lap**	**100,000,000**	
a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	20 Laporan	50,000,000	Diskominfo	20 Laporan	50,000,000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo	52 PD	50,000,000	Diskominfo	52 PD	50,000,000	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik**	**Diskominfo**	**30%**	**2,180,000,000**		**30%**	**2,180,000,000**	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota**	**Diskominfo**		**2,180,000,000**			**2,180,000,000**	
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	1 Dok	2,000,000,000	Diskominfo	1 Dok	2,000,000,000	
b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	1 Dok	80,000,000	Diskominfo	1 Dok	80,000,000	
c) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	1 Dok	100,000,000	Diskominfo	1 Dok	100,000,000	

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**Diskominfo**	**100%**	**280,000,000**		**100%**	**280,000,000**	
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**Diskominfo**	**1 Buku**	**280,000,000**		**1 Buku**	**280,000,000**	
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	1 dok	280,000,000	Diskominfo	1 dok	280,000,000	
TOTAL				**14,256,190,139**			**14,256,190,139**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Berdasar telaahan rancangan RKP 2023, Diskominfo Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan Prioritas Nasional ke 5 yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan Prioritas Nasional ke 7 yaitu Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya kualitas e-government yang efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE terintegrasi;
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
4. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi yang lengkap, valid dan terbarui.

Untuk tahun 2024 tujuan dan sasaran serta target yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tujuan	**Sasaran**	**Indiktor Tujuan/Sasaran**	**Target**
			2024
1	**2**	**3**	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, didukung pengelolaan data yang optimal.		Nilai Indeks SPBE	2,84
	Terwujudnya kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang optimal	Nilai domain kebijakan SPBE	3,10
		Nilai domain tata kelola SPBE	2,70
		Nilai domain manajemen SPBE	1,91
		Nilai domain layanan SPBE	3,19
	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Nganjuk	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk	77
	Terwujudnya data sektoral yang valid dan termutakhirkan	Nilai tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	3
		Nilai tingkat kematangan penerapan manajemen data	3
		Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	3
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	85
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 serta melaksanakan Visi dan Misi Bupati maka Dinas Komunikasi dan informatika menyusun Rencana

Kerja yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagian besar di Dinas Komunikasi dan informatika serta desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

9. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
11. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
14. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
16. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

20. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
28. Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

29. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
30. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
31. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
32. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;

b. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.

33. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
34. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

35. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
36. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

37. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
38. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
39. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

40. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk membutuhkan Anggaran sebesar Rp. 10.425.617.007,00 yang dipenuhi dari sumber Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo :
   1. Terwujudnya kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang optimal;
   2. Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk;
   3. Terwujudnya data sektoral yang valid dan termutakhirkan;
   4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah;
   5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi pemerintahan.

2. Mendukung Pencapaian Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

   Selain mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kegiatan tahun 2024 juga mendukung pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan informatika. Target SDGs yang dimaksud adalah :

   a. Jumlah Perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan target 50 Instansi.

b. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan target 100%.
c. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan target 52 PPID.

3. Mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 95 tahun 2018.
4. Melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Melaksanakan Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggarakan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
6. Melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah.

Rumusan Rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana ***Tabel Berikut:***

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 dan perkiraan maju tahun 2025

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**Diskominfo**	**80**	**6,420,592,550**			**90**	**6,517,313,942**
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**82**				**86**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Diskominfo**	**69 Dok**	**30,000,000**			**69 Dok**	**34,000,000**
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	3 Dok	6,000,000			4 Dok	10,000,000
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	10,000,000			30 Dok	10,000,000
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	10,000,000			30 Dok	10,000,000
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	6 Laporan	4,000,000			6 Laporan	4,000,000
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**Diskominfo**	**63 Dok**	**3,523,000,000**			**63 Dok**	**3,523,500,000**
a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	22 ASN	3,500,000,000			22 ASN	3,500,000,000
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	45 Dok	15,000,000			45 Dok	15,000,000
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	1 Lap	5,000,000			1 Lap	5,000,000
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	13 Lap	3,000,000			13 Lap	3,500,000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Diskominfo**	**25 Dok**	**515,000,000**			**25 Dok**	**509,000,000**
a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskominfo	20 Orang	8,000,000			20 Orang	9,000,000
b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	24 paket	7,000,000			-	-
c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	100 Orang	500,000,000			100 Orang	500,000,000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**Diskominfo**	**12 laporan**	**428,092,550**			**12 laporan**	**428,813,942**
a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	6,000,000			1 Paket	6,000,000
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	50,000,000			1 Paket	50,000,000
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	2,000,000			-	-
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	4 Paket	90,000,000			4 Paket	91,413,942
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	2 paket	16,000,000			2 paket	16,200,000
f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	1000 dok	7,000,000			1000 dok	8,000,000
g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	30 Lap	250,000,000			30 Lap	250,000,000
h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskominfo	300 dok	7,092,550			300 dok	7,200,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Diskominfo**	**26 buah**	**1,150,000,000**			**26 buah**	**1,195,000,000**
a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Diskominfo	2 unit	1,000,000,000			2 unit	1,000,000,000
b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	15 unit	150,000,000			15 unit	195,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Diskominfo**	**4 jasa**	**476,500,000**			**4 jasa**	**532,000,000**
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	4 Laporan	1,500,000			4 Laporan	2,000,000
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	400,000,000			12 Laporan	450,000,000
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 laporan	75,000,000			12 laporan	80,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Diskominfo**	**42 unit**	**298,000,000**			**42 unit**	**295,000,000**
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	10 unit	175,000,000			10 unit	180,000,000
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Diskominfo	5 unit	10,000,000			-	-
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Diskominfo	25 unit	13,000,000			25 unit	15,000,000
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	2 Unit	100,000,000			2 Unit	100,000,000

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**Diskominfo**	**100%**	**5,275,597,589**			**100%**	**5,327,000,000**
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	**Diskominfo**	**80%**				**85%**	
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	**Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar**	**Diskominfo**	**52 PD**	**1,510,597,589**			**52 PD**	**1,410,000,000**
	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	**Diskominfo**	**8 Layanan**				**12 Layanan**	
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo	1 Pusat Data	700,000,000			1 Pusat Data	500,000,000
b) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	4 Aplikasi	350,000,000			4 Aplikasi	400,000,000
c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Dok	360,597,589			1 Dok	400,000,000
d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo	1 Dok	100,000,000			1 Dok	110,000,000
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	**Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**Diskominfo**	**52 PD**	**3,765,000,000**			**52 PD**	**3,917,000,000**
a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	12 Dokumen	15,000,000			12 Dokumen	17,000,000
b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Sistem	3,750,000,000			1 Sistem	3,900,000,000
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**Diskominfo**	**65%**	**100,000,000**			**70%**	**100,000,000**
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan kegiatan self Asesment website dan aplikasi**	**Diskominfo**	**2 Lap**	**100,000,000**			**2 Lap**	**100,000,000**
a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	20 Laporan	50,000,000			20 Laporan	50,000,000
b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo	52 PD	50,000,000			52 PD	50,000,000

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik**	**Diskominfo**	**30%**	**2,180,000,000**			**40%**	**2,297,000,000**
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota**	**Diskominfo**		**2,180,000,000**				**2,297,000,000**
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	1 Dok	2,000,000,000			1 Dok	2,100,000,000
b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	1 Dok	80,000,000			1 Dok	82,000,000
c) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	1 Dok	100,000,000			1 Dok	115,000,000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**Diskominfo**	**100%**	**280,000,000**			**100%**	**300,000,000**
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**Diskominfo**	**1 Buku**	**280,000,000**			**1 Buku**	**300,000,000**
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	1 dok	280,000,000			1 dok	300,000,000
TOTAL				**14,256,190,139**				**14,541,313,942**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	5.427.000.000

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran Dinas Kominfo	Alokasi (2024)
1	Terwujudnya Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE yang Optimal	5.275.597.580
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Nganjuk	2.180.000.000
3	Terwujudnya data sektoral yang valid dan termutakhirkan	280.000.000
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	100.000.000
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah	6.420.592.550

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

NO.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja 2024		
		Uraian Output	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**80**	**6,420,592,550**
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	**82**	
2	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**69 Dok**	**30,000,000**
3	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	6,000,000
4	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30 Dok	10,000,000
5	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dok	10,000,000
6	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,000,000

7	**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**63 Dok**	**3,523,000,000**
8	a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 ASN	3,500,000,000
9	b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dok	15,000,000
10	c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5,000,000
11	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Lap	3,000,000
12	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**25 Dok**	**515,000,000**
13	a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	8,000,000
14	b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 paket	7,000,000
15	c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	500,000,000
16	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**12 laporan**	**428,092,550**
17	a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000
18	b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000
19	c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,000,000
20	d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	90,000,000
21	e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	16,000,000
22	f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 dok	7,000,000
23	g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	250,000,000
24	h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 dok	7,092,550
25	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**26 buah**	**1,150,000,000**
26	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	2 unit	1,000,000,000
27	b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	150,000,000
28	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**4 jasa**	**476,500,000**
29	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1,500,000
30	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400,000,000
31	c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	75,000,000

32	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**42 unit**	**298,000,000**
33	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	175,000,000
34	b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10,000,000
35	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	13,000,000
36	d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100,000,000
37	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**100%**	**5,275,597,589**
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	**80%**	
38	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar**	**52 PD**	**1,510,597,589**
		Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	**8 Layanan**	
39	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Pusat Data	700,000,000
40	b) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Aplikasi	350,000,000
41	c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	360,597,589
42	d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dok	100,000,000
43	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**	**Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**52 PD**	**3,765,000,000**
44	a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15,000,000
45	b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Sistem	3,750,000,000
46	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**65%**	**100,000,000**
47	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan kegiatan self Asesment website dan aplikasi**	**2 Lap**	**100,000,000**
48	a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20 Laporan	50,000,000
49	b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	52 PD	50,000,000
50	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik**	**30%**	**2,180,000,000**
51	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota**		**2,180,000,000**
52	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dok	2,000,000,000
53	b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dok	80,000,000
54	c) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dok	100,000,000
55	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**100%**	**280,000,000**
56	**Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**1 Buku**	**280,000,000**
57	a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dok	280,000,000
TOTAL				**14,256,190,139**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas pokok fungsi dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Diskominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
    a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI